

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini didapat dari penelitian yang di lakukan oleh Prosper Ferdina Hardiyanta (2015) “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Widya Pradja Menggunakan Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)” dan digunakan 4 kriteria yaitu kriteria kejujuran, disiplin, kesetiaan dan perilaku. Hasil yang diperoleh adalah menampilkan pegawai yang layak mendapatkan pinjaman.

Penelitian Rizal Tamtoro ,Hibertus Himawan (2015) “ Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Dengan Menggunakan Metode *Weighted Product*” dan digunakan 5 kriteria yaitu karakter, penghasilan, kemampuan, jaminan, kondisi. Hasil yang diperoleh adalah menampilkan hasil dari setiap pemohon,semakin besar nilainya maka semakin layak pemohon untuk menerima kredit.vda

Penelitian Fithriya Naila Khusna(2013) “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Menggunakan Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)” dan digunakan 5 kriteria yaitu kemampuan,

jaminan, watak, kondisi ekonomi, modal. Hasil yang diperoleh adalah menampilkan daftar calon debitur yang layak mendapatkan kredit.

Penelitian Sriwani Padu Lemba (2017) “Implementasi Metode *Analitycal Herarchy Process* Pada Pemilihan Pegawai Terbaik Berdasarkan Penilaian Kerja” dan digunakan 5 kriteria yaitu kejujuran, loyalitas, komitmen, kedisiplinan, dan kerjasama. Hasil yang diperoleh adalah menampilkan peringkat lima besar pegawai terbaik

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, maka penelitian ini yaitu “Sistem Pendukung Keputusan Persetujuan Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Paranggupito Menggunakan Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)” dan digunakan 4 kriteria yaitu kriteria kepribadian, kemampuan, jaminan dan keadaan ekonomi.

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian sebelumnya

Parameter Penulis	Metode	Objek	Kriteria
Prosper Ferdina Hardiyanta (2015)	AHP	Pemberian Pinjaman Di Koperasi Simpan Pinjam	kejujuran, disiiplin, kesetiaan dan perilaku
Rizal Tamtoro ,Hibertus Himawan (2015)	Weighted Product	Kelayakan Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam	karakter, penghasilan, kemampuan, jaminan, kondisi
Fithriya Naila Khusna(2013)	AHP	Keputusan Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam	kemampuan, jaminan, watak, kondisi ekonomi, modal

Sriwani Padu Lemba (2017)	AHP	Seleksi Pegawai Terbaik	Kejujuran, loyalitas , komitmen, kedisiplinan, dan kerjasama
Ariesta Anggraini (2017)	AHP	Persetujuan Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam	Domisili, Aset, Pekerjaan, Jaminan, Karakter.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) mulai dikembangkan pada tahun 1960-an, tetapi istilah sistem pendukung keputusan itu sendiri baru muncul pada tahun 1971, yang diciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Michael S. S. Morton (Budi Sutedjo Darma Oetomo, S.Kom, MM, 2002:177). Sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen melakukan pengambilan keputusan pada semiterstruktur dan tidak terstruktur. Pada dasarnya konsep sistem pendukung keputusan hanyalah sebatas pada kegiatan membantu para manajer melakukan penelitian serta menggantikan posisi serta peran manajer.

Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan dan yang memanipulasi data. Sistem ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan tak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. (Kusrini, 2007 hal 15), Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun

tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan.

Dalam membuat sebuah keputusan seringkali akan dihadapi berbagai bentuk kerumitan dan lingkup permasalahan yang sangat banyak. Untuk kepentingan tersebut, sebagian besar pembuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai rasio manfaat/biaya, dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengandalkan seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif, yang kemudian disebut Sistem Pendukung Keputusan (SPK). (Kusrini, 2007 hal 30).

2.2.2 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki menurut Saaty, (Kusrini, 2007). Hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variable diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variable yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Arimin, 2004).

Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki dari permasalahan (dekomposisi), melakukan perbandingan berpasangan antar variabel, melakukan analisis/evaluasi, dan menentukan alternatif terbaik (Saaty, 1993). Lebih lanjut, Suryadi dan Ramdhani (2000) mengemukakan bahwa pada dasarnya langkah-1 langkah dalam metode AHP diuraikan sebagai berikut:

a. Perbandingan penilaian/pertimbangan (*Comparative Judgments*)

Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Penilaian menghasilkan skala penilaian yang berupa angka. Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan menghasilkan prioritas. Perbandingan Skala terdapat pada table.

Tabel 2.2 Skala Dasar Perbandingan Pasangan

Tingkat Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada Elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

b. Menentukan Prioritas (*Synthesis of Priority*)

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematika.

c. Konsistensi Logis (*Logical Consistency*)

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP meliputi:

- i. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki

adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas.

ii. Menentukan prioritas elemen

- a) Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.
- b) Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya.

iii. Sintesi

Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah :

- a) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks
- b) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks
- c) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.

iv. Mengukur konsistensi

- a) Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya.

- b) Jumlahkan setiap baris
- c) Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan
- d) Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut λ maks
- v. Hitung *Consistency index* (CI) dengan menggunakan persamaan 2.1

$$\boxed{CI = (\lambda \text{ maks} - n) / (n - 1)} \quad \dots (2.1)$$

di mana n = banyaknya elemen

- vi. Hitung Rasio Konsistensi/*Consistency Ratio* (CR) dengan menggunakan persamaan 2.2

$$\boxed{CR = CI / RI} \quad \dots (2.2) \text{ di mana } \begin{aligned} CR &= \text{Consistency Ratio} \\ CI &= \text{Consistency Index} \\ IR &= \text{Indeks Random Consistency} \end{aligned}$$

- vii. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi (CI/IR) kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Daftar Indeks Random Konsistensi (IR) bisa dilihat dalam table.

Tabel 2.3 Daftar Indeks Random Consistency

Ukuran Matriks	Nilai IR
1,2	0,00
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49
11	1,51
12	1,48
13	1,56
14	1,57
15	1,59

2.3 Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang – orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong. Dalam Undang-undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu memiliki departemen / kementerian khusus dalam kabinet. Departemen ini berfungsi membawahi urusan-urusan koperasi nasional, seperti pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan penanganan-penanganan hukum apabila terjadi sesuatu (Fahriyah, 2015).

2.4 Koperasi simpan pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam secara umum adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Kegiatan dari sisi pasiva, koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan himpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Dana ini bisa berupa tabungan atau simpanan sedangkan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal usaha. Sedangkan dari sisi aktiva adalah melakukan upaya untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan dana yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk jaminan (Rudianto, 2006).

2.5 Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta

atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang. Proses pengajuan kredit bisa diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Berkas harus lengkap, benar dan akurat. Setelah semua berkas komplit, maka pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian dan pengecekan untuk memutuskan layak tidaknya usaha koperasi tersebut. Jika dari hasil review dan inspeksi diputuskan bahwa koperasi tersebut telah memenuhi syarat maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan surat pengesahan izin pendirian koperasi harus telah diterima oleh pengurus koperasi tersebut (P.Kent, 2011).

2.6 Koperasi Prima Paranggupito

Koperasi Simpan Pinjam Prima Paranggupito merupakan satu koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam di wilayah Kabupaten Wonogiri ,Jawa Tengah yang melayani pemberian kredit pada masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Prima Paranggupito memiliki kurang lebih 500 anggota.

Dalam persetujuan kredit seorang anggota harus mempunyai kriteria-kriteria yang telah ditentukan dari Koperasi tersebut antara lain adalah kriteria karakter, kriteria aset, kriteria pekerjaan, kriteria jaminan, dan kriteria domisili. Kriteria penilaian terdapat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian

No	Kriteria	Nilai
1	Karakter	0-100
2	Aset	0-100
3	Pekerjaan	0-100
4	Jaminan	0-100
5	Domisili	0-100

Skala Penilaian yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Skala Penilaian

Range Nilai	Keterangan
75 – 100	Baik
65 – 74	Cukup
< 64	Kurang

Penjelasan :

Kriteria yang ada adalah kriteria karakter, kriteria aset, kriteria pekerjaan, kriteria jaminan, dan kriteria domisili:

a. Karakter

Kriteria Karakter adalah watak, sifat dan kebiasaan seorang peminjam kredit. Hal ini dianggap penting karena dari sinilah bisa dilihat apakah seorang peminjam kredit memiliki itikad baik untuk membayar kredit atau tidak.

Penilaian Karakter

Tabel 2.6 penilaian Karakter

Nilai	Keterangan
86-100	Sangat Baik
76-85	Baik
66-75	Cukup
51-65	Kurang
0-50	Sangat Kurang

Penjelasan dalam penilaian karakter anggota yang mengajukan kredit :

Seorang anggota yang mengajukan kredit dinilai dari bertanggungjawab terhadap kelancaran pembayaran angsuran kreditnya jika dulu pernah meminjam ataupun pernah meminjam ditempat lain. Bagaimana sifat anggota terhadap rekan bisnis, customer dan supliernya dalam menjalankan usahanya.

b. Aset

Kriteria aset adalah banyaknya kekayaan yang dimiliki seorang anggota diantaranya rumah, kendaraan, hewan ataupun tempat usaha.

c. Pekerjaan

Kriteria pekerjaan adalah pekerjaan seorang anggota yang meliputi gaji dan jabatan.

d. Jaminan

Kriteria Jaminan adalah barang yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya peminjam kredit tidak dapat melunasi cicilan. Semakin besar nilai jaminan, semakin tinggi poin penilaian koperasi

e. Domisili

Kriteria domisili adalah tempat tinggal seorang anggota disuatu daerah, apakah seorang anggota asli dari daerah tersebut atau pendatang.